

Alternatif *Restorative Justice* bagi Korban Kecelakaan Sukhoi

Pada Rabu, 9 Mei 2012 di sekitar Gunung Salak, Bogor, pesawat Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), produksi Rusia, mengalami kecelakaan dan menewaskan seluruh penumpang dan awak pesawat. Kecelakaan pesawat yang sedang mengadakan 'joy flight' ini mendapat liputan luas mancanegara.

Terlepas dari apa penyebab kecelakaan pesawat baru dan dianggap sebagai pesawat masa depan ini yang masih dalam penyelidikan ini, persoalan ganti rugi pada keluarga korban menjadi salah satu isu yang menjadi perbincangan. Meski Pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai persoalan ganti rugi bagi penumpang kecelakaan pesawat udara seperti yang tercantum pada Pasal 3 Peraturan Menteri (PM) Perhubungan No. 77 (2011) dimana setiap penumpang berhak mendapatkan Rp1.25 miliar, persoalan ini tidak sederhana, mengingat pesawat Sukhoi yang mengalami kecelakaan tersebut tidak dalam kapasitas sebagai pesawat komersil seperti yang disyaratkan dalam PM ini. Disamping itu, status sebagai pesawat asing, dan apakah pihak Rusia telah meratifikasi Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) (Kompas 15/5), berpotensi akan menyulitkan pelaksanaan ganti rugi bagi para keluarga korban sehingga dapat menimbulkan sengketa. Penyelesaian sengketa dalam pembayaran ganti rugi sesuai nilai keadilan yang diharapkan oleh para keluarga korban ini mungkin dapat diberikan melalui jalur alternatif *restorative justice* (RJ) yang akhir ini banyak diwacanakan di tanah air.

Alternatif *Restorative Justice*

Tony Marshall (1999;5) memberikan pengertian RJ sebagai '*a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*', sehingga RJ ini dianggap sebagai alternatif keadilan yang lebih baik dibanding keadilan hukum konvensional selama ini. Selain itu, keadilan RJ telah mendapat dukungan di tanah air, seperti yang terlihat pada pernyataan Menteri Hukum dan HAM yang akan memberi perhatian pada penyelesaian perkara melalui RJ (Kompas, 19/3/ 11). Bagaimana hubungan mekanisme RJ ini dengan korban kecelakaan SSJ100?

Sebagai perbandingan, pada 9 Februari 1982, pesawat Japan Airlines DC-8 jatuh di Tokyo Bay dan menewaskan 24 penumpangnya. Dilaporkan, penyebab kecelakaan pesawat milik Japan Airlines ini adalah ketidakstabilan mental pilot. Dalam liputan pers luas, president airlines secara pribadi langsung menemui keluarga korban, dengan berlutut dan membungkuk, menghaturkan perasaan duka yang mendalam dan perasaan yang penuh tanggungjawab meminta maaf atas kejadian tersebut. Pada acara tersebut, keluarga korban, tanpa proses rumit, diberikan pembayaran ganti rugi tunai yang cukup besar. Kelihatannya, akibat permintaan maaf yang tulus langsung dari pimpinan tertinggi perusahaan penerbangan dan proses ganti rugi yang

tidak menyusahkan menyebabkan tiadanya tuntutan hukum dari para keluarga korban.

Akankah perasaan keluarga korban pesawat JAL DC-8 ini dapat disamakan dengan keluarga korban SSJ100, dan dapatkah permintaan maaf seperti yang seperti dilakukan oleh pimpinan tertinggi perusahaan, sebagai salah satu bentuk penyelesaian RJ, dapat menyelesaikan persoalan ini? Hal ini kelihatannya sulit terjadi, mengingat budaya Jepang dan Indonesia serta kondisi negara yang berbeda. Meski sama sebagai negara Asia, budaya dan nilai permintaan maaf yang begitu tinggi di negeri Sakura tidak dapat disamakan dengan budaya Indonesia. Di Jepang, permintaan maaf secara resmi dapat dianggap sebagai upaya perbaikan hubungan yang rusak akibat suatu sengketa, serta dapat menggantikan pembayaran ganti rugi yang dinilai lebih baik (Wagatsuma, Rosett; 1986;461). Sementara di Indonesia, budaya meminta maaf dan saling memaafkan seperti itu sulit terlihat, meski dengan adanya kunjungan Presiden SBY ke lokasi kecelakaan. Hal ini mungkin disebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat bahwa pernyataan prihatin yang diberikan oleh pimpinan negara dan pejabat terkait, tidak dilakukan dengan keikhlasan dan tanggungjawab yang tinggi. Terlebih lagi, pernyataan Menko Kesra yang menyatakan bahwa pemerintah hanya memberikan santunan karena alasan kemanusiaan, meski tidak wajib melakukannya (Kompas 15/5) dapat memberi dampak negatif bagi perasaan keluarga korban.

Selain itu, keinginan pejabat dan kondisi keuangan negara yang masih sering dikorupsi pada intitusi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta intitusi lainnya (Kompas 15/5), dapat dipastikan kurang mendukung untuk memberikan ganti rugi yang layak bagi para keluarga korban. Oleh sebab itu pelaksanaan RJ melalui budaya permintaan maaf dan ganti rugi, pada saat ini, masih akan sulit terlaksana.

Family Group Conferencing

Dari beberapa alternatif pelaksanaan RJ, seperti *victim-offender mediation*, *police-led conferencing*, *reparation board* (Dignan (2005;6), salah satu bentuk RJ yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sengketa pemberian ganti rugi bagi keluarga korban kecelakaan SSJ100 adalah dengan mekanisme *family group conferencing* (FGC). Menurut Hakim Fred McElrea (O'Driscoll (2008;62), beberapa prinsip dapat dilakukan melalui jalur ini, yakni: 1. Adanya pemindahan kekuasaan Negara, terutama pengadilan kepada masyarakat; 2. mengakomodasi respon masyarakat; dan 3. Melibatkan keluarga korban sebagai peserta kunci, sehingga memungkinkan proses penyembuhan sengketa. Melalui mekanisme yang dimulai di New Zealand pada 1989 serta dimasukkan dalam *CYPF Act* ini, FGC akan dapat berfungsi baik di Indonesia.

Meski pada kenyataanya, pelaksanaan penyelesaian sengketa diluar pengadilan belum mendapat tempat yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme ini masih bisa diandalkan. Salah satu hal penting mengapa jalur ini dapat dipertimbangkan adalah karena adanya mekanisme *Court oversight*, yang memungkinkan pengadilan mengawasi pelaksanaan RJ

ini. Selain itu, pengadilan dapat memberlakukan berbagai sanksi kepada para pihak yang tidak mengindahkan putusannya, dan seperti yang diperlihatkan oleh Pengadilan New Zealand, pengadilan tetap mengawasi keputusannya sampai enam bulan, atau dapat memutuskan kembali untuk memberikan sanksi penjara.

Oleh sebab itu, mengingat akan banyaknya permasalahan hukum yang akan dihadapi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pemberian ganti pada keluarga korban, mekanisme FGC ini dapat dipertimbangkan membentuk mediator yang mengerti hukum ganti rugi dan jasa penerbangan, serta melibatkan keluarga korban, diikuti dengan keinginan pengadilan untuk mengawasi pelaksanaan diskusi yang timbul. Tanpa adanya campur tangan pengadilan, mediasi antara keluarga korban dan pihak perusahaan penerbangan mungkin akan mengalami proses yang lama dan melahirkan putusan yang tanpa ikatan hukum yang jelas.

Selain itu, pelaksanaan FGC ini, perlu dilakukan sesuai standar RJ yang berlaku secara internasional. Braithwaite (2002;563-577) mengungkapkan bahwa beberapa prinsip standar seperti pembatasan kekuasaan pemerintah, serta dominasi kekuasaan tertentu atas masyarakat, pengutamaan HAM, pengakuan hak para pihak dalam pengadilan, serta pelaksanaan jalur komunikasi yang seimbang dari para keluarga korban sangat diperlukan dalam pelaksanaan RJ. Semoga dengan standar ini, pelaksanaan RJ di Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik, dan proses pemberian ganti rugi bagi para keluarga korban kecelakaan SSJ100 dapat memenuhi rasa keadilan seperti yang diharapkan.